

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN KAS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG

ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF CASH INTERNAL CONTROL SYSTEM OF DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG

Gabriella Margaretha Kaligis¹, Ventje Ilat², Winston Pontoh³

*¹²³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email : margarethgk@gmail.com*

ABSTRACT

Internal Control System is a plan used by the company for the purpose of maintaining the security of company property, checking the accuracy and correctness of accounting data, promote efficiency , and help encourage compliance with management policies that have been established . This study was conducted to determine whether the Internal Control System in cash at the Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung already well underway in accordance with Law No.60 Year 2008. The results of the research conducted , obtained a description of the procedure of acceptance of cash coming in and cash out as well as internal controls are carried out by Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung is effective and meets the elements of internal control.

Keywords : *Cash, Internal Control System, Government*

ABSTRAK

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu perencanaan yang digunakan perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan UU No.60 Tahun 2008. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh gambaran mengenai prosedur penerimaan kas masuk dan kas keluar serta pengendalian internal yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sudah efektif dan sudah memenuhi unsur-unsur internal control.

Kata Kunci : *Kas, Sistem Pengendalian Intern, Pemerintah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dari setiap instansi pemerintah agar terciptanya lingkungan yang dapat memacu perilaku yang positif dan manajemen yang baik. Terutama dapat mendorong seluruh pihak agar memiliki tanggung jawab dan kesadaran tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk dapat melaksanakan efisiensi dan efektifitas anggaran. Dalam melaksanakan tuntutan tersebut pimpinan harus dapat melaksanakan pengawasan secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dan kebocoran. Data akuntansi merupakan salah satu jalan keluar dalam menghadapi masalah tersebut. Melalui uraian diatas, penerapan sistem pengendalian intern kas menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperhatikan oleh setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan laporan keuangan yang handal dan akurat.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem pengendalian intern kas masuk dan kas keluar Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Dalam Pasal 1 ayat (2) PP No.71 Tahun 2010 menyatakan, Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Akuntansi Pemerintahan

Dalam PP No.24 Tahun 2005 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dari operasi keuangan pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah menhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Pada dasarnya akuntansi pemerintahan merupakan suatu prosedur akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa yang tujuannya untuk memantau proses pelaksanaan anggaran sehingga dapat diketahui mulai dari penciptaan anggaran tersebut sampai pada penggunaannya.

Sistem Pengendalian Intern

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh AICPA, maka dapatlah dirumuskan tujuan dari pengendalian intern yaitu :

- a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan
- b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi
- c. Memajukan efisiensi operasi perusahaan
- d. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi
- e. Pemantauan, pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan Kas

Sistem Pengendalian intern terhadap penerimaan kas sangat membantu organisasi pemerintah dalam kegiatan operasionalnya. Semua penerimaan daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dikelola dalam APBD.

Sistem Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas

Dalam fungsi pengeluaran kas; sistem pengawasan harus secara benar dan teliti, agar tidak adanya transaksi pengeluaran kas yang terjadi tanpa adanya persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Penelitian Terdahulu

Thalib (2011) Efektivitas Penerapan Pengendalian Intern (Internal Control) terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah di Kota Manado.

Wowor (2015) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon. Tujuannya menganalisis efektivitas pengendalian kas pada DPPKAD Kota Tomohon. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya sistem pengendalian intern kas pada DPPKAD Kota Tomohon telah efektif.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang diperoleh melalui wawancara dan informasi lain yang berkaitan dalam penelitian ini, serta data yang didapat dari lembaga pengumpul data dan kepustakaan terutama data kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung dan dilaksanakan selama dua bulan sejak bulan Agustus-September tahun 2015.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti
2. Wawancara langsung (*face to face*) dengan responden.
3. Dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif dimana metode ini membahas permasalahan yang sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan sedemikian rupa sehingga ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Definisi Operasional

Sesuai dengan latar belakang permasalahan objek penelitian yang akan dibahas serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik maka akan diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari suatu permasalahan yang ada.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu sistem yang digunakan pemerintah untuk mengawasi/mengendalikan aktivitas di pemerintahan baik dalam kegiatan intern maupun kegiatan kas, sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008
3. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas disebut arus kas.

3. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Kota Bitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 tahun 2012. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Visi :

“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berkualitas dan partisipatif”.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- b. Optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas, dan berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparaturbidang pendapatan sesuai dengan standar pelayanan.

Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Bitung dikoordinir oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yang dalam hal ini mengkoordinasikan pengelolaan Pendapatan Daerah di semua SKPD pemungut pajak dan retribusi daerah atau yang berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Bitung. Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2011-2015 melalui strategi :

1. Ektensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah
3. Peningkatan kualitas pelayanan
4. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2014 dikeluarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dimana pada pasal 285 ayat 1 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi :
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Jenis pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung adalah melalui Pajak Daerah. Ada 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh DIPENDA Bitung :

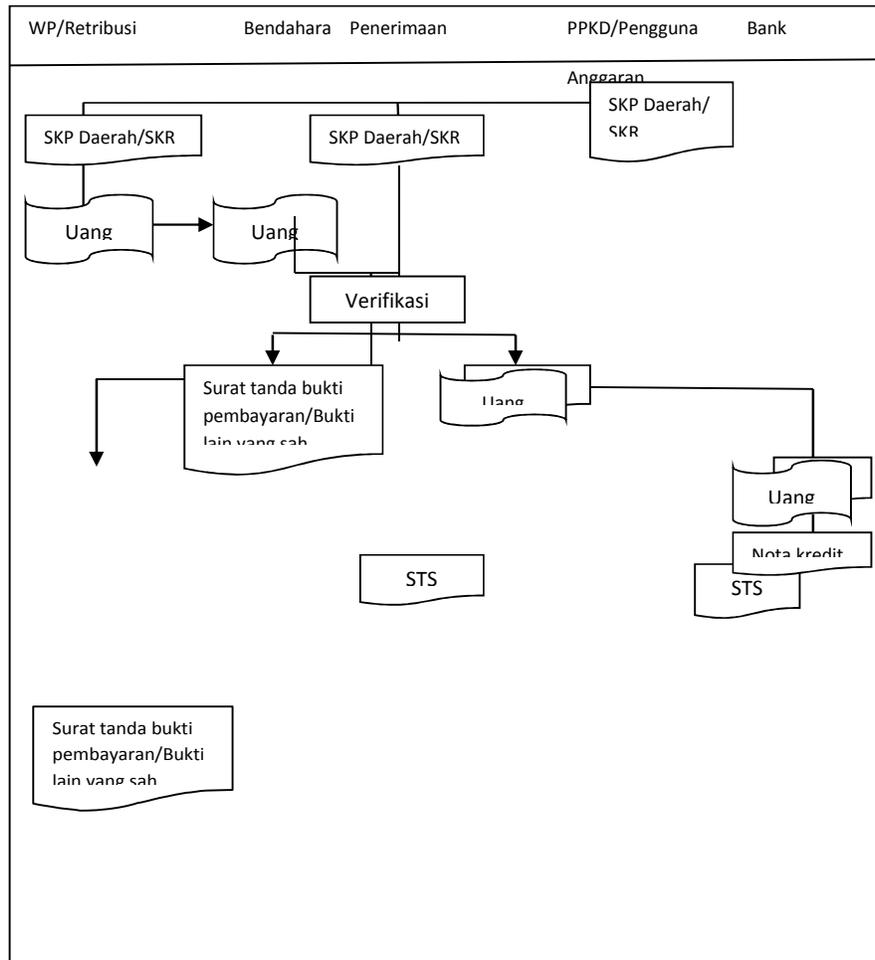
Jenis Pajak	Tarif Pajak
1. Pajak Hotel	10%
2. Pajak Restoran	10%
3. Pajak Hiburan	20%
a. Pagelaran Seni	25%
b. Kontes kecantikan/binaraga	25%
c. Diskotik	30%
d. Karaoke	25%
e. Klub malam	35%
f. Panti pijat/mandi uap/dsb	30%
g. Pertandingan Olahraga	20%
h. Permainan ketangkasan	50%
i. Kesenian tradisional	10%
4. Pajak Reklame	25%
5. Pajak Mineral bukan logam dan batuan	25%
a. Pasir halus (m ³)	20.000
b. Pasir Vulkanik (m ³)	12.500
c. Batu kerikil/pasir sungai(m ³)	75.000
d. Batu pecah (m ³)	125.000
e. Batu dasar/gunung (m ³)	50.000
f. Lempung (m ³)	12.500
6. Pajak Penerangan Jalan	10%

- 7. Pajak Air Tanah 20%
- 8. Pajak Parkir 15%
- 9. Pajak sarang burung walet 5%
- 10. PBB perdesaan dan perkotaan >1 Milyar: 0,205
<1 Milyar: 0,105
- 11. BPHTB 5%

Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama satu hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Adapun bagan alir yang merupakan prosedur dari sistem penerimaan kas dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung, yaitu

Pelaksanaan Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan



Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas

Prosedur sub sistem akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas :

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6. Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)

1. Surat Penyediaan dana

SPD adalah Surat Penyediaan dana yang dibuat oleh BUD (Bendahara Umum Daerah dalam rangka manajemen kas daerah. Pihak terkait :

a. Kuasa BUD

Dalam kegiatan ini, kuasa BUD mempunyai tugas :

- Menganalisis DPA-SKPD yang ada di database
- Menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya data per SKPD
- Menyiapkan draft SPD
- Mendistribusikan SPD kepada para pengguna anggaran

b. PPKD

Dalam kegiatan ini PPKD mempunyai tugas :

- Meneliti draft SPD yang diajukan kuasa BUD
- Melakukan otorisasi SPD

2. Surat Permintaan Pembayaran

Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP (Surat Perintah Pembayaran) kepada pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Pihak terkait :

a. Bendahara Pengeluaran

Dalam kegiatan ini bendahara pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya
- Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD

b. PPK-SKPD

Dalam kegiatan ini PPK-SKPD mempunyai tugas:

- Menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran

c. PPTK

Dalam kegiatan ini PPTK mempunyai tugas :

- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan SPP-LS

3. Surat Perintah Membayar (SPM)

Proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Pihak terkait :

a. PPK-SKPD

Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- Menguji SPP beserta kelengkapannya
- Membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan mengajukannya ke Pengguna Anggaran
- Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara SKPD tidak lengkap
- Membuat register SPM

b. Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:

- Mengotorisasi dan menerbitkan SPM
- Mengotorisasi Surat Penolakan SPM yang diterbitkan PP-SKPD bila SPP yang diajukan Bendahara SKPD tidak lengkap.

4. Surat Perintah Pencairan Dana

Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. Pihak yang terkait :

a. Kuasa BUD

Dalam kegiatan ini Kuasa BUD memiliki tugas sebagai berikut :

- Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM
- Mencetak SP2D
- Mengirimkan SP2D kepada Bank
- Membuat register SP2D

b. Pengguna Anggaran

Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran memiliki tugas sebagai berikut:

- Menandatangani SP2D

c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam kegiatan ini Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas :

- Mencatat SP2D pada dokumen Penatausahaan yang terdiri atas :
 - BKU Pengeluaran
 - Buku Pembantu Simpanan Bank
 - Buku Pembantu Pajak
 - Buku Pembantu Panjar
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian objek

5. Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang/tambah uang persediaan (UP/GU/TU) kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam kegiatan ini PPK-SKPD memiliki tugas :

- Meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan
- Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek
- Menghitung pengenaan PPN/Pph atas beban pengeluaran per rincian objek
- Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya

6. Nota Permintaan Dana

Nota permintaan dana adalah nota yang digunakan untuk mencairkan dana melalui bendahara pengeluaran. Pada mekanisme ini tidak terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ), tetapi hanya menunjukkan nota atau kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Internal Kas yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung telah efektif dan memadai.
2. Pemisahan tugas yang cukup yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sudah efektif
3. Sistem dan prosedur yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sudah efektif, karena telah memenuhi syarat sistem dan prosedur Pengendalian Internal.

Saran

Setelah dilakukan penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung yaitu melengkapi saran dan prasarana / fasilitas pelayanan, mengintensifkan pembinaan / pelatihan kepada para pegawai agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang baik, dengan begitu dapat tercipta sistem pengendalian yang lebih baik,

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hongren, Harrison, 2008, *Accounting*. Pearson. International Edition. Upper Saddle River. New Jersey.
- [2] Ronald Duska, Brenda Shay Duska, Julie Anne Ragatz, 2011. *Accounting Ethics*. 350 Main Street Malden, USA
- [3] Hurt, Robert L. 2013, *Accounting Information System*. Third Edition. McGraw-Hill. New York.
- [4] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.
- [5] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- [6] Riandari (2013). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas di Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang <http://eprints.undip.ac.id/39369/1/Riandari.pdf>
- [7] Harahap, Sofyan Syafiri. 2013. *Teori Akuntansi/Sofyan Syafiri Harahap*. Ed. Revisi-Cet. 13. Rajawali Pers. Jakarta.
- [8] Sitorus, Victor, 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Bogor.
- [9] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah
- [10] Gaol Jimmy, 2008, *Sistem informasi Manajemen*, Grasindo. Jakarta
- [11] Nordiawan Deddi, Hertianti Ayuningtyas. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- [12] Pontoh Winston, 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka. Jakarta.
- [13] Republik Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2005 tentang *Keuangan Negara*, Jakarta.

- [14] Lalamentik, 2012. Skripsi. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Kas Untuk Mencegah Penyelewengan Dana pada Dinas Pendapatan Kota Manado*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado
- [15] Republik Indonesia. Keputusan Menteri PAN Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Jakarta.
- [16] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.